

Sebagai upaya pelaksanaan amanat Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Negara Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali membentuk Tim Pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bupati Morowali melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Kabag Adpum) Kantor Pemda Morowali Drs. Mahfud Samir ditemui diruang kerjanya baru-baru ini mengatakan, pembentukan tim penertiban Izin Usaha Pertambangan dan Perkebunan dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Morowali nomor 188.45/0264/ADPUM/XI/2011 tanggal 09 November 2011, melibatkan seluruh instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Dikatakan Mahfud Samir, sebagai program pertama dilaksanakan Tim yang diketui Assisten I Bupati Morowali Yosar Kardiat itu melakukan penegasan batas dan pemasangan tanda batas Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Perkebunan.

“sudah ada surat edaran Bupati Morowali nomor 045.2/0275/ADPUM/XI/2011 perihal penegasan batas dan pemasangan tanda batas IUP tertanggal 10 November 2011, surat ini sudah kita bagi ditujukan kepada seluruh pemilik IUP di Morowali,”tuturnya.

Ditempat terpisah Assisten I Bupati Morowali Yosar Kardiat menambahkan, surat penegasan terhadap perusahaan tersebut berisikan 5 (lima) point, segera dilaksanakan pemasangan patok/pal batas wilayah sesuai koordinat/peta wilayah IUP Operasi Produksi masing-masing, pembuatan tanda batas tersebut harus telah selesai dilaksanakan sebelum kegiatan Operasi Produksi dimulai, bagi perusahaan yang telah melakukan maupun yang belum melaksanakan pemasangan tanda batas wilayah tersebut segera melaporkan kepada Bupati Morowali melalui Sekretariat Tim Penertiban Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setkab Morowali, penegasan dan pemasangan pal batas IUP dilaksanakan pemilik IUP bersama-sama dengan Tim Penertiban Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Perkebunan, segala biaya yang ditimbulkan akibat pemasangan pal batas IUP menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Yosar juga menyampaikan setelah selesai tugas pertama tersebut, nantinya tim akan terus bekerja diantaranya melakukan pengawasan terhadap segala hal menyangkut kegiatan produksi perusahaan

“instansi terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkungan Hidup tetap akan melakukan pengawasan terus-menerus terhadap kegiatan produksi perusahaan, dan apabila ada perusahaan yang melanggar mekanisme aturan berlaku, menurut Bapak Bupati, tidak akan segan-segan mencabut Izin Usaha perusahaan melanggar,”ungkap Yosar.

### CIPTAKAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN YANG CLEAR AND CLEAN

Sejalan dengan upaya pemerintah ditingkat pusat dalam menciptakan usaha pertambangan yang clear and clean, pemerintah daerah Kabupaten Morowali melalui Tim Penertiban itu

## **Bupati Morowali Bentuk Tim Penertiban Izin Pertambangan Dan Perkebunan**

Written by Webmaster

Wednesday, 07 December 2011 00:00 -

---

nantinya berupaya menciptakan iklim usaha pertambangan dan perkebunan Kabupaten Morowali yang cler and clean.

Menurut Yosar, selama ini Kabupaten Morowali termasuk salah satu daerah ramai menuai gunjingan public seputar tumpang tindih lahan, kurangnya koordinasi antar instansi dan lain-lain.

“dengan pembentukan tim penertiban yang melibatkan seluruh stake holders terkait dilingkup pemerintah daerah ini nantinya akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di dunia investasi kita,”tutur mantan camat Bumiraya itu.